



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Desember 2020

Nomor : 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Persiapan Menghadapi Perkara
Pengajuan Permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan Serentak Tahun
2020.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
(Sebagaimana Terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan dengan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 yang diajukan oleh beberapa pasangan calon atau Pemantau ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur bahwa penyampaian salinan permohonan Pemohon kepada

Termohon (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) dilaksanakan tanggal 18 s.d. 19 Januari 2021.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan yang sampai dengan saat ini terdapat pasangan calon atau Pemantau telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar menyiapkan lebih awal beberapa dokumen dan kegiatan persiapan, antara lain:
 - a. Salinan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai dokumen alat bukti bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Salinan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai dokumen alat bukti bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Salinan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai dokumen alat bukti bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Mengidentifikasi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam kotak suara, yang berdasarkan kondisi dalam proses pelaksanaannya diprediksi cukup berpotensi menjadi obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pasangan calon selaku pemohon atau sebagai dokumen alat bukti bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- e. Mengidentifikasi dokumen berupa rekomendasi Panwas TPS, Panwas Desa/Kelurahan, Panwascam, rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi yang berdasarkan kondisi dalam proses pelaksanaannya diprediksi cukup berpotensi menjadi alat bukti yang akan diajukan oleh pasangan calon selaku pemohon atau sebagai dokumen alat bukti bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- f. Mengidentifikasi dokumen berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau putusan Mahkamah Agung yang berdasarkan kondisi dalam proses pelaksanaannya diprediksi cukup berpotensi menjadi alat bukti yang akan diajukan oleh pasangan calon selaku pemohon atau sebagai dokumen alat bukti bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- g. Mengkoordinasikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk memperoleh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagai dasar/rujukan penentuan ambang batas pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- h. Menyiapkan saksi atau ahli apabila diperlukan yang dapat memperkuat argumentasi dalam proses penanganan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- i. Menyiapkan pengadaan advokat/kuasa hukum/pengacara apabila diperlukan untuk membantu proses penanganan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- j. Menyiapkan Tim PHP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi mengkomunikasi proses penyusunan jawaban, daftar alat

bukti dan kegiatan lain yang diperlukan dengan Tim PHP yang dibentuk di KPU.

3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, dapat membuka Kota Suara tersebel sepanjang terdapat Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Sudah teregister di Mahkamah Konstitusi;
4. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dalam rangka untuk memperoleh C.Hasil-KWK sebagai alat bukti perkara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Membuka Kotak Suara wajib disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Aparat Kepolisian setempat;
 - b. Mengambil Formulir C.Hasil-KWK untuk difotokopi;
 - c. Mengembalikan Formulir C-Hasil-KWK ke dalam Kotak Suara;
 - d. Menutup Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan cara memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya dan disegel Kembali; dan
 - e. Pelaksanaan pembukaan Kotak Suara dalam rangka untuk memperoleh Formulir C.Hasil-KWK sebagai alat bukti dituangkan ke dalam Berita Acara.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arief Budiman



Lampiran Surat Ketua KPU
Nomor : 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020
Tanggal : 22 Desember 2020

Daftar KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

NO	KPU PROVINSI
1	PROVINSI BENGKULU
2	PROVINSI JAMBI
3	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
6	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
7	PROVINSI SULAWESI TENGAH
8	PROVINSI SULAWESI UTARA
9	PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KPU KOTA
1	KOTA DENPASAR
2	KOTA CILEGON
3	KOTA TANGERANG SELATAN
4	KOTA SUNGAI PENUH
5	KOTA DEPOK
6	KOTA SEMARANG
7	KOTA SURAKARTA
8	KOTA PEKALONGAN
9	KOTA MAGELANG
10	KOTA BLITAR
11	KOTA SURABAYA
12	KOTA PASURUAN
13	KOTA BANJARBARU
14	KOTA BANJARMASIN
15	KOTA SAMARINDA
16	KOTA BONTANG
17	KOTA BALIKPAPAN
18	KOTA BATAM
19	KOTA METRO

NO	KPU KOTA
20	KOTA BANDAR LAMPUNG
21	KOTA TERNATE
22	KOTA TIDORE KEPULAUAN
23	KOTA MATARAM
24	KOTA DUMAI
25	KOTA PALU
26	KOTA MANADO
27	KOTA TOMOHON
28	KOTA BITUNG
29	KOTA BUKITTINGGI
30	KOTA SOLOK
31	KOTA MEDAN
32	KOTA BINJAI
33	KOTA SIBOLGA
34	KOTA PEMATANGSIANTAR
35	KOTA TANJUNG BALAI
36	KOTA GUNUNG SITOLI
37	KOTA MAKASSAR

NO	KPU KABUPATEN
1	KAB. KARANG ASEM
2	KAB. BADUNG
3	KAB. BANGLI
4	KAB. TABANAN
5	KAB. JEMBRANA
6	KAB. SERANG
7	KAB. PANDEGLANG
8	KAB. MUKOMUKO
9	KAB. SELUMA
10	KAB. KEPAHANG
11	KAB. LEBONG
12	KAB. BENGKULU SELATAN
13	KAB. REJANG LEBONG
14	KAB. BENGKULU UTARA
15	KAB. KAUR
16	KAB. BANTUL
17	KAB. GUNUNG KIDUL
18	KAB. SLEMAN
19	KAB. GORONTALO
20	KAB. BONE BOLANGO
21	KAB. POHUWATO
22	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
23	KAB. BATANGHARI
24	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
25	KAB. BUNGO
26	KAB. PANGANDARAN
27	KAB. SUKABUMI
28	KAB. INDRAMAYU
29	KAB. BANDUNG
30	KAB. KARAWANG
31	KAB. TASIKMALAYA
32	KAB. CIANJUR
33	KAB. REMBANG
34	KAB. KEBUMEN
35	KAB. PURBALINGGA
36	KAB. BOYOLALI
37	KAB. BLORA
38	KAB. KENDAL
39	KAB. SUKOHARJO
40	KAB. SEMARANG

NO	KPU KABUPATEN
41	KAB. WONOSOBO
42	KAB. PURWOREJO
43	KAB. WONOGIRI
44	KAB. KLATEN
45	KAB. PEMALANG
46	KAB. GROBOGAN
47	KAB. DEMAK
48	KAB. SRAGEN
49	KAB. PEKALONGAN
50	KAB. NGAWI
51	KAB. LAMONGAN
52	KAB. JEMBER
53	KAB. PONOROGO
54	KAB. KEDIRI
55	KAB. SITUBONDO
56	KAB. GRESIK
57	KAB. TRENGGALEK
58	KAB. MOJOKERTO
59	KAB. SUMENEP
60	KAB. BANYUWANGI
61	KAB. MALANG
62	KAB. SIDOARJO
63	KAB. BLITAR
64	KAB. PACITAN
65	KAB. TUBAN
66	KAB. KAPUAS HULU
67	KAB. BENGKAYANG
68	KAB. SEKADAU
69	KAB. MELAWI
70	KAB. SINTANG
71	KAB. KETAPANG
72	KAB. SAMBAS
73	KAB. BANJAR
74	KAB. KOTABARU
75	KAB. BALANGAN
76	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
77	KAB. TANAH BUMBU
78	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
79	KAB. MAHAKAM ULU
80	KAB. KUTAI KARTANEGARA

NO	KPU KABUPATEN
81	KAB. PASER
82	KAB. BERAU
83	KAB. KUTAI TIMUR
84	KAB. KUTAI BARAT
85	KAB. TANA TIDUNG
86	KAB. BULUNGAN
87	KAB. MALINAU
88	KAB. NUNUKAN
89	KAB. BANGKA SELATAN
90	KAB. BELITUNG TIMUR
91	KAB. BANGKA TENGAH
92	KAB. BANGKA BARAT
93	KAB. KEP. ANAMBAS
94	KAB. BINTAN
95	KAB. LINGGA
96	KAB. KARIMUN
97	KAB. NATUNA
98	KAB. PESISIR BARAT
99	KAB. LAMPUNG SELATAN
100	KAB. WAY KANAN
101	KAB. LAMPUNG TIMUR
102	KAB. PESAWARAN
103	KAB. LAMPUNG TENGAH
104	KAB. KEP. ARU
105	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
106	KAB. MALUKU BARAT DAYA
107	KAB. BURU SELATAN
108	KAB. PULAU TALIABU
109	KAB. HALMAHERA TIMUR
110	KAB. KEPULAUAN SULA
111	KAB. HALMAHERA UTARA
112	KAB. HALMAHERA SELATAN
113	KAB. HALMAHERA BARAT
114	KAB. LOMBOK UTARA
115	KAB. BIMA
116	KAB. SUMBAWA BARAT
117	KAB. DOMPU
118	KAB. LOMBOK TENGAH
119	KAB. SUMBAWA
120	KAB. BELU

NO	KPU KABUPATEN
121	KAB. MALAKA
122	KAB. MANGGARAI BARAT
123	KAB. SUMBA TIMUR
124	KAB. MANGGARAI
125	KAB. NGADA
126	KAB. SUMBA BARAT
127	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
128	KAB. SABU RAIJUA
129	KAB. NABIRE
130	KAB. ASMAT
131	KAB. KEEROM
132	KAB. WAROPEN
133	KAB. MERAUKE
134	KAB. MAMBERAMO RAYA
135	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
136	KAB. BOVEN DIGOEL
137	KAB. YAHUKIMO
138	KAB. SUPIORI
139	KAB. YALIMO
140	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
141	KAB. MANOKWARI SELATAN
142	KAB. SORONG SELATAN
143	KAB. RAJA AMPAT
144	KAB. KAIMANA
145	KAB. TELUK BINTUNI
146	KAB. FAKFAK
147	KAB. TELUK WONDAMA
148	KAB. MANOKWARI
149	KAB. KEP. MERANTI
150	KAB. INDRAGIRI HULU
151	KAB. BENGKALIS
152	KAB. PELALAWAN
153	KAB. ROKAN HULU
154	KAB. KUATN SINGINGI
155	KAB. ROKAN HILIR
156	KAB. SIAK
157	KAB. MAMUJU TENGAH
158	KAB. PASANGKAYU
159	KAB. MAMUJU
160	KAB. MAJENE

NO	KPU KABUPATEN
161	KAB. PANGKAJENE KEP.
162	KAB. BARRU
163	KAB. GOWA
164	KAB. MAROS
165	KAB. LUWU TIMUR
166	KAB. TANA TORAJA
167	KAB. KEP. SELAYAR
168	KAB. SOPPENG
169	KAB. LUWU UTARA
170	KAB. BULUKUMBA
171	KAB. TORAJA UTARA
172	KAB. BANGGAI LAUT
173	KAB. TOJO UNA-UNA
174	KAB. POSO
175	KAB. TOLI-TOLI
176	KAB. MOROWALI UTARA
177	KAB. SIGI
178	KAB. BANGGAI
179	KAB. KOLAKA TIMUR
180	KAB. BUTON UTARA
181	KAB. KONAWA SELATAN
182	KAB. MUNA
183	KAB. KONAWA KEPULAUAN
184	KAB. KONAWA UTARA
185	KAB. WAKATOBI
186	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
187	KAB. MINAHASA UTARA
188	KAB. MINAHASA SELATAN
189	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
190	KAB. SOLOK
191	KAB. DHARMASRAYA
192	KAB. SOLOK SELATAN
193	KAB. PASAMAN BARAT
194	KAB. PASAMAN
195	KAB. PESISIR SELATAN
196	KAB. SIJUNJUNG
197	KAB. TANAH DATAR
198	KAB. PADANG PARIAMAN
199	KAB. AGAM
200	KAB. LIMA PULUH KOTA

NO	KPU KABUPATEN
201	KAB. MUSIRAWAS UTARA
202	KAB. PENUNGGAL ABAB LEMATANG ILIR
203	KAB. OGAN KOMERING ULU
204	KAB. OGAN ILIR
205	KAB. OKU SELATAN
206	KAB. OKU TIMUR
207	KAB. MUSI RAWAS
208	KAB. SERDANG BEDAGAI
209	KAB. TAPANULI SELATAN
210	KAB. TOBA SAMOSIR
211	KAB. LABUHAN BATU
212	KAB. ASAHAN
213	KAB. PAKPAK BHARAT
214	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
215	KAB. SAMOSIR
216	KAB. SIMALUNGUN
217	KAB. LABUHANBATU UTARA
218	KAB. LABUHANBATU SELATAN
219	KAB. KARO
220	KAB. NIAS SELATAN
221	KAB. NIAS UTARA
222	KAB. NIAS BARAT
223	KAB. NIAS
224	KAB. MANDAILING NATAL